

PERAN DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH UNTUK MENARIK INVESTASI ASING DI PROVINSI PAPUA

Anwar, SPd, SH.,MH¹

Abstrak : Peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua untuk menarik investasi asing telah memberikan hasil yang maksimal, ini dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan investasi asing yang masuk ke Provinsi Papua mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Strategi utama BKPM Daerah Provinsi Papua adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha dan kerjasama antar daerah, lembaga teknis terkait serta masyarakat.

(Kata Kunci: Investasi Asing, Pemerintah Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah).

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Investasi asing merupakan proses internasionalisasi yang dibawa oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) telah merubah pola industri nasional ke alam modernisasi secara lebih efektif dan efisien dengan menghadirkan teknologi maupun manajemen usaha dan pemasaran.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Terlepas dari tidak setuju maupun setuju terhadap kehadiran investasi asing, namun secara empiris dikatakan bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud di sini adalah bahwa kehadiran investasi asing memberi kesempatan kerja bagi penduduk, mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal, adanya alih teknologi maupun alih pengetahuan, menambah devisa apalagi investasi asing yang berorientasi pada ekspor dapat menambah penghasilan negara dalam bentuk pajak.

Suatu negara yang berdaulat mempunyai otoritas untuk mengatur negaranya termasuk masalah investasi asing, artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di negara tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Indonesia yang secara tegas telah mencantumkan dalam konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh aktivitas harus berdasarkan norma-norma hukum yang tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan dunia usaha dalam hal ini melakukan investasi. Berkaitan dengan iklim investasi asing pembentukan undang-undang terelasi terhadap tujuan penyelenggaraan penanaman modal itu sendiri di antaranya; menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing dan iklim usaha yang kondusif.²

Tindakan yang dilakukan oleh negara penerima modal untuk mengatasi persoalan investasi asing adalah bagaimana memberikan aturan atau ketentuan hukum yang terkait dengan undang-undang penanaman modal maupun undang-undang terkait lainnya. Adapun memberikan berbagai ketentuan investasi karena lingkungan dunia usaha baik di tingkat nasional, regional maupun internasional telah mengalami

² Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka, Jakarta, hlm 13

berbagai perkembangan yang demikian pesat, sehingga ketentuan investasi harus disesuaikan dengan tuntutan global.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang untuk menciptakan iklim investasi, antara lain;³

1. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaankepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha para investor asing;
2. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan *high cost economy*;
3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai Hak Atas Kekayaan milik investor;
4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diterapkan, telah terbentuk suatu perekonomian yang lebih terbuka dengan ciri persaingan bebas. Karakteristik ini telah menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor usaha di kota-kota besar di Indonesia. Keterlibatan investor asing dalam pembangunan suatu wilayah atau negara tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan baik yang telah ditetapkan di pusat maupun di daerah, di samping itu juga melalui perundingan dengan para pihak yang kemudian melahirkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan

³ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 171

komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan politik, kemudahan dan relatif murah nya memperoleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan sumber kekayaan alam yang melimpah.⁴ Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian serius adalah Provinsi Papua yang merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat menjanjikan bagi Indonesia, akan tetapi investasi yang masuk masih mengarah ke arah sektor pertambangan (*investor high class*) sedangkan potensi di bidang perkebunan, pertanian, perikanan belum optimal dilakukan secara nasional.

Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Papua merupakan daerah khusus yang diberikan otonomi khusus menyimpan begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) melakukan promosi secara besar-besaran kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor komoditi unggulan (sumberdaya alam), perkebunan, pertanian, perkebunan dan perikanan dengan pemberian fasilitas yang lebih baik. Hadirnya otonomi khusus untuk Provinsi Papua ternyata tidak menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi sebelum otonomi khusus pada tahun 1997 mencapai 7,42% dan tahun 1998 mencapai 12,72% sedangkan pertumbuhan ekonomi sesudah otonomi khusus diimplementasikan tahun 2003 mencapai 2,96% dan tahun 2004 mencapai 0,53%.⁵

Strategi untuk mengembangkan investasi yang lebih menarik adalah memperkuat kelembagaan dan keleluasaan peran daerah sesuai prinsip

⁴ Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2006

otonomi daerah dan desentralisasi. Secara teoritis, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah dengan memberikan ketentuan (perda) yang meringankan investor asing. Sejalan dengan itu kelembagaan bidang investasi menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah, sehingga penataan dan penguatannya perlu diwujudkan.

Ada beberapa permasalahan yang timbul di seputar kelembagaan investasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menarik Investasi asing, antara lain : bagaimanakah peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) dalam menarik investasi asing di Provinsi Papua; bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Terminologi Penanaman Modal

Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti: “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang di rancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu

sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi berarti *Pertama*, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; *Kedua* jumlah uang atau modal yang ditanam. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan *terminology*, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan.⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1, penanam modal adalah sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi populer dalam dunia usaha dan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁸

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum

⁶ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Alih Bahasa Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo, Jakarta, hlm 300

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 386

⁸ Ida Bagus Rachmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1

(*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*).⁹

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara investasi dan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan.¹⁰

Penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap tepat untuk digunakan.

Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat diklasifikasi menjadi dua (2) yaitu sebagai berikut :

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang

Pengertian penanaman modal didalam ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung.¹¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal, "*Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan*

⁹ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

¹⁰ Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, CV, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 32-33

¹¹ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

menanamkan modal, baik oleh penanam modal negeri maupun oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”

Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal; kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk usaha baru; mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal; memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.¹²

2. Investasi tak langsung (*indirect investment*) atau *portofolio investment*

Investasi tak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal jangka pendek disebut demikian karena pada umumnya jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung dari fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.¹³

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung sebagai berikut ;¹⁴

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada invetasi tak langsung biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada invetasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

¹² Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

¹³ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op. cit*, hlm 4

¹⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

Gambaran Umum Investasi di Provinsi Papua

1. Kondisi Umum

Luas Provinsi Papua setelah dikurangi daerah yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat adalah 31.706.208 km², terletak di antara 130⁰ – 141⁰ Bujur Timur dan 225⁰ – 9⁰ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara Samudra Pasifik
- Sebelah Selatan Laut Arafura
- Sebelah Barat Provinsi Papua Barat
- Sebelah Timur Negara Papua New Guinea

Keadaan topografi Provinsi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa sampai dengan dataran tinggi yang dipadati dengan hutan tropis. Walaupun Provinsi Papua merupakan Provinsi terbesar di Indonesia, namun jumlah penduduknya paling sedikit. Berdasarkan proyeksi tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 2.015.616 jiwa yang apabila dikaitkan dengan luas wilayah 31.706.208 km² maka rata-rata kepadatan penduduk hanya 5 jiwa/km² dan rata-rata pertumbuhan 6,31% pertahun.¹⁵

2. Orientasi Pembangunan Provinsi Papua dan Operasionalisasi Kebijakan Mendukung Investasi

Pembangunan di Provinsi Papua tahun 2009 merupakan kelanjutan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu salah satunya membangun Tanah Papua yang damai dan sejahterah sesuai dengan visi Gubernur Provinsi Papua yaitu membangun Papua Baru dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi

¹⁵ Barnabas Suebu, 2007, *Kami Menanam, Kami Menyiram Tuhanlah yang Menumbuhkan*; Tahun Pertama Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Barnabas Suebu dan Alex Hasegen diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, hlm 17

kerakyatan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Berbagai kegiatan dan pendekatan telah dilakukan selama tahun 2009 yang didukung dengan berbagai kebijakan pembangunan antara lain dengan dana dari Pemerintah Daerah dalam membangun sendi-sendi kehidupan dan perekonomian masyarakat (pembangunan ekonomi kampung) melalui pemberian bantuan langsung ke kampung/desa.

Kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua hanya akan tercapai secara terus menerus apabila terjadi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi hanya mungkin terjadi apabila ada investasi. Artinya diperlukan semua upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan, social, politik di Papua yang mendukung dan mengundang investasi.

Pokok-pokok kebijakan untuk menarik investasi antara lain;

1. Pelayanan satu atap untuk memudahkan pelayanan para investor;
2. Keringan perpajakan yang dilaksanakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
3. Kemudahan perijinan dalam bentuk prosedur yang dipersingkat;
4. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih;
5. Kerjasama dan dukungan masyarakat adat dalam bentuk *equity participation*;
6. Kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi;
7. Promosi investasi yang pro-aktif dan proporsional;
8. Ketersediaan data dan informasi yang akurat;
9. Membentuk Badan Pengelola Kekayaan Alam Papua sebagai pusat data dan informasi, mengkoordinasi pemanfaatan sumber daya alam Papua secara berkelanjutan dan penataan ruang.

Pembangunan melalui dana pemerintah saja tidaklah cukup, sehingga dibutuhkan juga campur tangan para investor berupa

lapangan pekerjaan dan sarana/prasarana untuk mendukung peningkatan kegiatan masyarakat di Papua. Guna lebih mendorong perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang maka dibutuhkan dukungan pemerintah dalam membina dan mendorong pertumbuhan investasi agar dapat berkembang di Provinsi Papua.

3. Hubungan Investor dan Masyarakat Adat Papua

Selain memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah daerah dan negara, setiap investor pun perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal berikut ini demi terjaminnya kelangsungan investasi di Papua;

- a. Tanah harus diakui sebagai tanah milik rakyat (tanah ulayat), karena itu investasi harus mengakomodir hak-hak masyarakat adat atas tanah itu, baik dalam bentuk sewa tanah atau penyertaan tanah milik rakyat sebagai modal (equality participation). Prinsip ini tentu harus dilakukan dengan tidak menjadikan beban yang irasional bagi para investor;
- b. Dampak negatif dari lingkungan yang diderita oleh masyarakat asli sebagai akibat dari kegiatan investasi itu harus diakui dan direkognisi secara wajar dengan sejauh mungkin menggantikan fungsi yang hilang dengan fungsi yang sama;
- c. Rekrutmen tenaga kerja harus diupayakan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, yang diimbangi dengan pelatihan tenaga kerja secara serius.
- d. Investasi harus memungkinkan masyarakat setempat mengembangkan berbagai bisnis yang terkait langsung dengan investasi;
- e. Investor, sebagai wujud dari tanggung jawab sosialnya wajib melakukan kegiatan-kegiatan community development untuk masyarakat setempat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua

Setiap provinsi mempunyai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) yang diketuai oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Gubernur. BKPMMD bertugas membantu investor dalam hal memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan investor, membantu Gubernur kepala daerah provinsi dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan perizinan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Secara umum, peran dan fungsi BKPMMD Provinsi Papua telah membuahkan hasil yang maksimal dengan hadirnya investor asing menanamkan modalnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dan peran daerah, lembaga teknis terkait serta peran serta masyarakat sehingga di daerah tercipta iklim investasi yang kondusif.

Langkah-langkah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) dalam Menarik Investor

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh BKPMMD untuk menarik calon investor menanamkan modalnya di Provinsi Papua adalah :

1. Kepastian Hukum

Masalah kepastian hukum merupakan pokok masalah mendasar terkait upaya menarik investasi. Utamanya adalah inskonsistensi sejumlah produk perundang-undangan dengan undang-undang. Pada tingkat daerah banyak perda redistribusi dan pajak daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, serta di daerah seringkali terjadi memperpanjang birokrasi yang menghambat kegiatan investasi.

Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman terhadap perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri (domestic) yang akan beroperasi di Provinsi Papua merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan agar perusahaan dapat beroperasi dengan maksimal..

2. Koordinasi Perijinan

Masalah koordinasi kelembagaan pada saat ini menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah, sehingga penataan dan penguatan perlu diwujudkan. Tanpa koordinasi kelembagaan yang tepat dan benar akan menghambat investasi berjalan dengan baik.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, diakui atau tidak banyak menimbulkan dampak negatif, karena di daerah menjadikan otonomi sebagai instrument bagi peningkatan investasi. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan kemudahan bagi investor dalam hal pengurusan izin merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong kegiatan investasi.

3. Informasi Potensi Daerah

Pemerintah daerah harus mengidentifikasi kekhususan setiap segmen wilayah, baik kondisi alamnya maupun karakteristik penduduknya. Selain itu pemerintah daerah memberikan pelayanan informasi kepada calon investor mengenai potensi-potensi sumber daya alam yang ada (melalui pameran, pamphlet, majalah, surat kabar, internert dan sebagainya), sehingaa para investor memiliki gambaran terhadap jenis usaha yang dijalankan.

Hambatan-hambatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Papua

1. Payung Hukum

Selama ini yang menjadi acuan BKPM D dalam pengelolaan investasi di daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi di daerah. Salah satu ilustrasi tidak terakomodasinya pengelolaan investasi dapat dilihat dari pembukaan pintu yang terlalu luas bagi masuknya modal asing yang dapat memperburuk keadaan ekonomi serta masih banyak ketidakserasian materi antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

2. Kondisi Politik dan Keamanan di Daerah

Krisis moneter mulai tahun 2008 sampai sekarang dan ketidakstabilan ekonomi yang meliputi kebijakan pemerintah, kasus korupsi, peranan usaha, regulasi pasar, tenaga kerja serta pelayanan publik yang rendah masih sangat dirasakan dan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di daerah. Ketidakstabilan politik juga menjadi faktor penting bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi.

3. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi hambatan bagi BKPMD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hambatan utama dalam hal sumberdaya manusia adalah kurangnya karyawan untuk mengelola banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BKPMD.

Upaya-upaya BKPMD untuk Mengatasi Hambatan

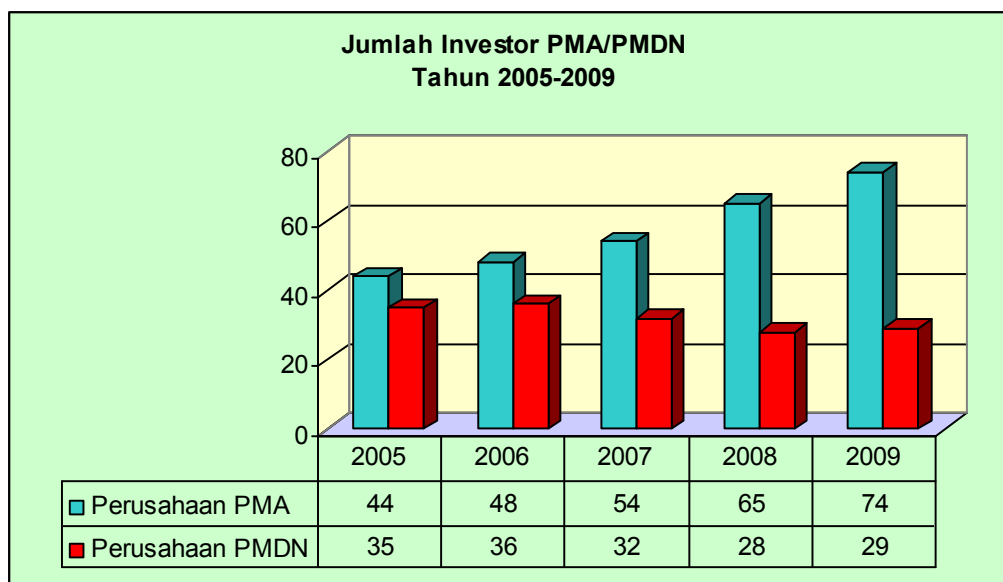
1. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian peraturan dan kebijakan

pemerintah yang terkait dengan penanaman modal. Melanjutkan upaya penyederhanaan proses pemberian perizinan proyek penanaman modal asing.

2. Meningkatkan upaya promosi investasi terpadu dan kerjasama investasi di luar negeri, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proyek penanaman modal dan mempercepat pembangunan sistem perizinan investasi secara elektronik
3. Meningkatkan kemampuan aparatur sumberdaya manusia dalam bidang penanaman modal di daerah.
4. Rekrutmen karyawan baru untuk mendukung kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Perkembangan dan Pertumbuhan Investasi Asing di Provinsi Papua

Otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan potensi sumberdaya alam dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk mengelola sumberdaya alam diperlukan modal yang diharapkan datang dari investor. Keberhasilan mengundang investor asing tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dinas terkait dan masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 1. Grafik Jumlah Investor dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009¹⁶

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Papua sangat tinggi terbukti dengan banyaknya investor yang langsung mengajukan proposal ke Provinsi Papua. Jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 naik secara signifikan. Khusus untuk tahun 2008 ada sebanyak 65 Penanaman Modal Asing, sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 74 Penanaman Modal Asing naik sekitar 13,85%. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi asing tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan baik dalam bentuk tata cara maupun perijinan penanaman modal.

¹⁶ Sumber: Buku Perkembangan Penanaman Modal Perusahaan PMDN/PMA Yang Beroperasi di Provinsi Papua Dari Tahun 2005 sampai dengan 2009

Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Menarik Investasi Asing

1. Pendayaan Kewenangan dan Potensi Daerah

Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus asas desentralisasi. Berdasarkan atas dekonsentrasi maka provinsi merupakan wilayah administrasi. Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) salah satu kewenangannya yang diberikan kepada pemda adalah mengenai pengelolaan penanaman modal. Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah yang antara lain meliputi aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumberdaya manusia, infrastruktur yang telah dibangun, budaya dan sistem sosial lainnya yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam kaitan ini, kebijakan yang diambil adalah upaya menciptakan iklim yang kondusif agar lapangan usaha semakin berkembang dan lapangan kerja rakyat semakin luas.

2. Sinergi Pembiayaan Pembangunan

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah menjadi factor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah, mengubah secara mendasar model pembiayaan pemerintahan daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat dan tenaga yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Selama ini pembangunan daerah bertitik tolak pada kekuatan keuangan pemerintah, jika diharapkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ada daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya terbatas, sehingga masih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat khususnya dana APBN (dana perimbangan). Kondisi ini jelas perlu diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBN lebih diutamakan sebagai stimulasi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat di daerah, dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor non pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai modal perorangan, modal dunia usaha (PMDN dan PMA), modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis bahkan membantu dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Kerjasama antar Daerah

Persaingan untuk menarik investasi didalam negeri tidak lagi terjadi hanya antar daerah provinsi, tetapi juga antar daerah kabupaten/kota. Persaingan tersebut cenderung dari waktu ke waktu semakin tajam bahkan persaingan persaingan ini menjadi tidak sehat bila timbul

egoisme daerah secara berlebihan sehingga lain tidak dianggap sebagai mitra yang harus digandeng, sebaliknya dianggap sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Persaingan antar daerah dalam merebut investor harus dikembangkan dalam suasana persaingan dan kompetisi yang positif dan sehat. Oleh sebab itu diharapkan setiap daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah.

Keadaan persaingan yang tidak sehat akan menjadi kompetisi yang dibangun yang sifatnya lokal, bukan kompetisi regional atau global dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas. Dalam menarik investasi, masing-masing daerah dapat saja terjebak pada egois kedaerahan yang mengartikan bahwa daya saing (competitiveness) dan kemandirian (indendependency) hanya diartikan sebatas wilayah kabupaten/kota sehingga berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya pembangunan investasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Guna menghindari dari hal-hal tersebut serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan kerjasama (net working) antar kabupaten/kota baik dalam provinsi maupun antar provinsi yang bias didasarkan pada aspek geografis, aspek bisnis maupun kesamaan kepentingan.

4. Penciptaan Iklim Kondusif

Pada era otonomi daerah sekarang ini, tidak dapat dipungkiri terdapat daerah kabupaten/kota yang menfokuskan energinya pada pemanfaatan potensi unggulan dan penggarapan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kebijakan pajak, restribusi dan pungutan lainnya guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Apabila hal ini dilakukan secara berlebihan tentu akan kontra produktif dengan upaya peningkatan perekonomian daerah itu sendiri. Namun demikian banyak daerah menyadari pentingnya investasi dan bergeraknya dunia usaha untuk meningkatkan dan mendorong perekonomian daerah sehingga semakin melebarnya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah daerah harus aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha. Selain itu pemerintah daerah juga di tuntut untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha sehingga para investor dapat merasakan kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman modal di daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi lambat laun akan memberikan efek penggandaan pada perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat sekitarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran dan fungsi BKPM Provinsi Papua adalah membantu investor dalam memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan. Selain itu BKPM diberi peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di daerah (perda) bisa dilaksanakan oleh investor. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah.

2. Perkembangan dan peningkatan investasi di Provinsi Papua tidak terlepas dari strategi-strategi dan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah Provinsi Papua dan selalu berkoordinasi serta mensinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti sarankan beberapa hal terkait dengan peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di daerah agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan strategis yang mendukung investasi guna meningkatkan pendapat daerah
2. Pemerintah daerah tetap terus meningkatkan perannya didalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung masuknya investasi di daerah dan kebijakan yang memudahkan investor untuk memperoleh ijin usaha.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah meningkatkan bekerjasama dengan dinas-dinas teknis terkait dalam hal pelayanan kepada investor guna peningkatan kegiatan investasi di daerah.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah lebih giat lagi mempromosikan potensi-potensi daerah di luar negeri dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman, 1991, *Ensiklopodi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet. VI, Radnya Paramita, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Buku Perkembangan Penanaman Modal Perusahaan PMA/PMDM yang Beroperasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2009.
- BPS. 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat Per Provinsi*.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Edisi Keempat, Jakarta.
- Hermawan, Asep, 2005, *Penelitian Bisnis: Paradigma Kualitatif*, P.T. Grasindo, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- John Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, alih bahasa Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo, Jakarta.
- Jatmika, Sidik, 2001, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Biografi Publisng, Yogyakarta.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adiyta, Bandung.
- Oloan, Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2006, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampe Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Tesis*, Yogyakarta.
- Rachbini, Didiek J, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, PT. Index, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Univ.Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soemardjono, Maria S. W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian – Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukanto, Soejono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suebu, Barnabas, 2007, *Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan; Tahun Pertama Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur*, Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.
- Strauss, Anselm dan Juliet Lorbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Supanca, Ida Bagus Rachmadi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 2001, *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja, dalam Peningkatan Kesejahteraan*, Perencanaan Pembangunan, Edisi 23.
- Untung, Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjojo, Muridan S, 2009, *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Yayasan Tifa dan Obor, Jakarta.

Zainudun, Muhamad, 2009, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*,